



PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PATI 2023 – 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2022**

**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023 – 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

RENCANA STRATEGIS.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	9
2.1.1 Dasar Hukum dan Struktur Organisasi	9
2.1.2 Tugas Dan Fungsi	12
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.....	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia	20
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	22
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.....	23
2.3.1 Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Pendanaan	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.....	31
2.4.1 Analisis RENSTRA K/L dan Provinsi terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.....	39
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026	50
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	60
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1 Tujuan	62
4.2 Sasaran.....	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
5.1 Strategi.....	66
5.2 Kebijakan	66

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN92
BAB VIII PENUTUP Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN CASCADING98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan**21**

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan .**21**

Tabel 2.3 Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.....**22**

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati**24**

Tabel 2.5 Jenis Pelayanan Dan Perkiraan Anggaran**30**

Tabel 2.6 Analisis Renstra K/L dan Provinsi untuk Perumusan Tantangan dan Peluang Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.....**31**

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**39**

Tabel 3.2 Telaah RENSTRA K/L dan Provinsi untuk Perumusan Faktor Penghambat dan Pendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Pati ..**40**

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Daerah dalam Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.....**63**

Tabel 5 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.....**67**

Tabel 6 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan**70**

Tabel 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD**93**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skematis Keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah 3
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Sekretarat Daerah 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Sekretariat Daerah sebagai salah satu unsur staf memiliki kedudukan yang strategis karena bertugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Berkaitan dengan berakhirnya perodesisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 dan dalam rangka kesinambungan pembangunan, penyelarasan dan sinergi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, maka disusunlah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diikuti dengan dokumen Renstra PD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, diinstruksikan antara lain sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
3. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada.

Tema Tahunan pada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati 2023-2026 sebagai berikut :

1. Tahun 2023 mengambil tema Meningkatkan ketahanan ekonomi menuju masyarakat sejahtera yang berfokus meningkatkan ketahanan ekonomi, khususnya sektor utama penopang perekonomian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

2. Tahun 2024 mengambil tema Meratanya kualitas SDM dan terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang unggul untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas yang berfokus peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kesenjangan kualitas manusia berbasis *gender* maupun wilayah.
3. Tahun 2025 mengambil tema Meningkatnya pemberdayaan ekonomi lokal berkelanjutan untuk menunjang peningkatan daya saing daerah berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat dengan berbasis potensi lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Tahun 2026 mengambil tema Pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan birokrasi sebagai landasan pembangunan periode mendatang yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

Dalam penyusunan Renstra periode Tahun 2023-2026 menggunakan nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) memperhatikan Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah serta menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati tahun 2023 - 2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD.

Renstra Sekretariat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif. Rencana strategis Sekretariat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati selaku Kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Pati.

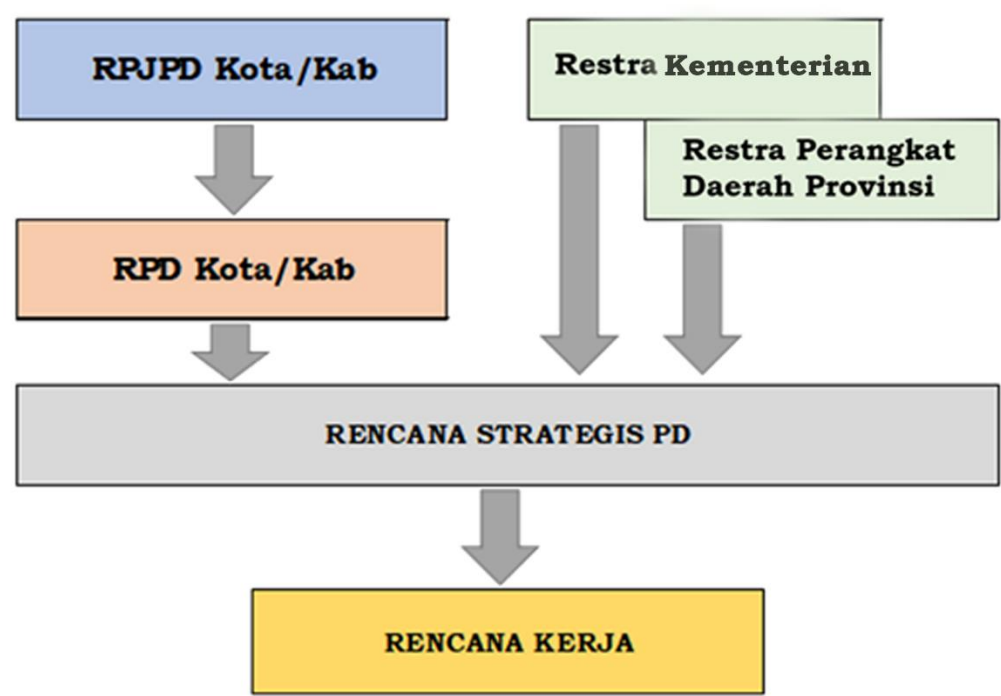
Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 2023-2026 memiliki keterkaitan dengan RPD Kabupaten Pati 2023-2026 dan Renja PD.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2023-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah bersama Rencana Strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati. Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengandung tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rensta Sekretariat Daerah ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Secara skematis keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1



1.2 Landasan Hukum

Secara teknis penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah namun dengan dilakukan elaborasi terhadap Inmendagri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Secara rinci landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
31. Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
32. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023-2026 yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan Pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2023–2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu:

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Pati yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Pati yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
- c. Tersusunnya perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Pati yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : **PENDAHULUAN**
Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
Berisi uraian tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.
- BAB III : **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam RPD Tahun 2023-2026, Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Isu Strategis PD.
- BAB IV : **TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- BAB V : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.
- BAB VI : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.
- BAB VII : **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- BAB VIII : **PENUTUP**
Bab ini memuat pernyataan penutup dari dokumen perencanaan perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

2.1.1 Dasar Hukum dan Struktur Organisasi

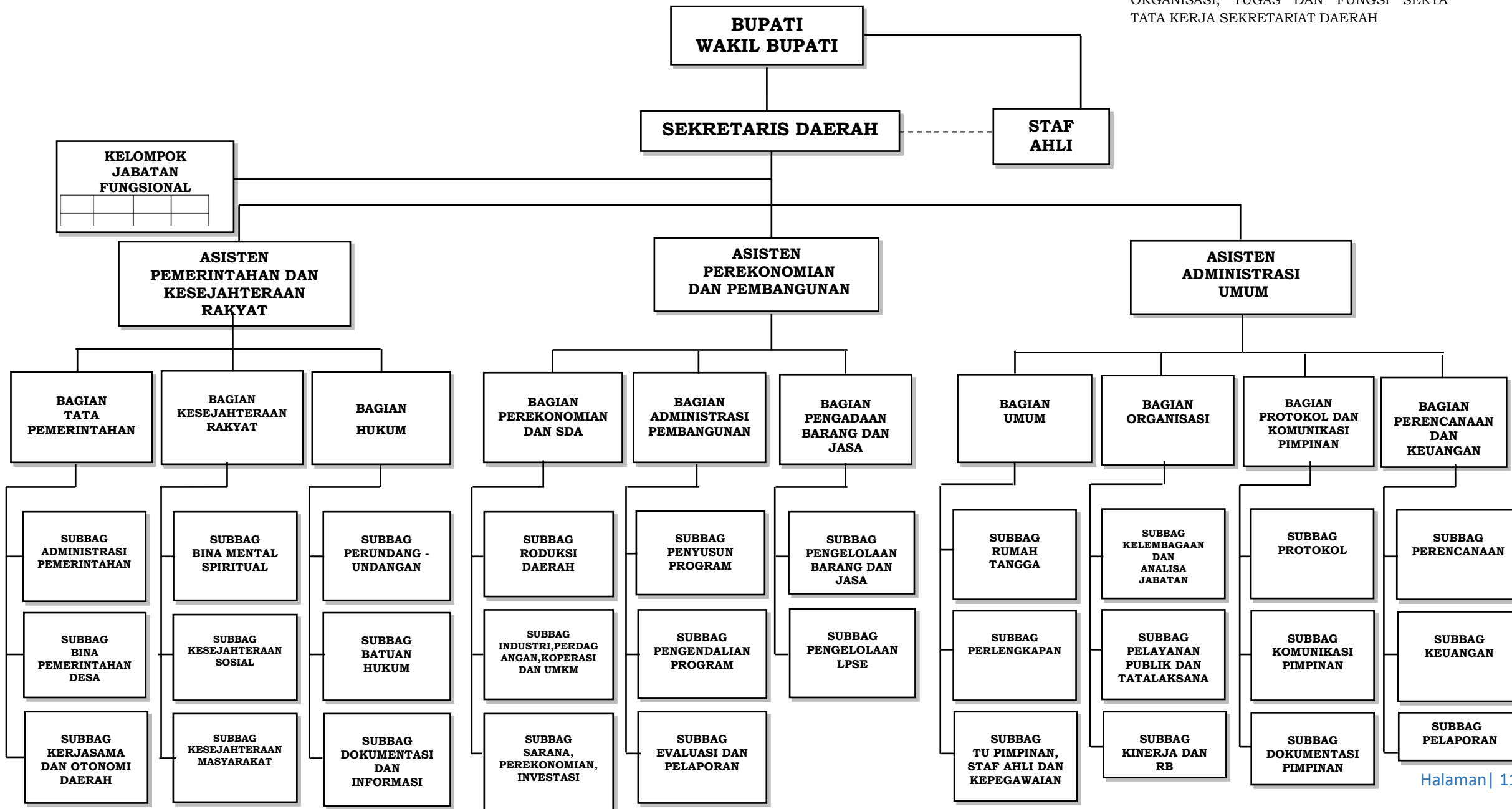
Dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diperbarui dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Bina Pemerintahan Desa;
 - c) Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian dan Investasi;
 - b) Subbagian Produksi Daerah; dan
 - c) Subbagian Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program;
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan LPSE
- d. Asisten Administrasi Umum,
membawahkan dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Rumah Tangga;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.
 2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan RB
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Pelaporan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



2.1.2 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas dari masing-masing unit kerja di Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang Tata Pemerintahan dan Hukum, dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan dan hukum;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan

koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan bidang Administrasi Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, dan Bina Pemerintahan Desa serta pembinaan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan.

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, kerja sama dan otonomi daerah.

Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, kerja sama dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, kerja sama dan otonomi daerah;
- e. pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, dan pendidikan, kesejahteraan sosial serta kesehatan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan dan pendidikan, kesejahteraan sosial serta kesehatan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan dan pendidikan, kesejahteraan sosial serta kesehatan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang agama dan pendidikan, kesejahteraan sosial serta kesehatan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata,
- d. Pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- e. pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa;
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan Subbagian Sarana Perekonomian dan Investasi, Produksi Daerah, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta pembinaan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Perekonomian.

Kepala Bagian Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perekonomian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Perekonomian;
- c. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah Subbagian Sarana Perekonomian dan Investasi, Produksi

Daerah, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Subbagian Sarana Perekonomian dan Investasi, Produksi Daerah, Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- g. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- h. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- i. pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya;

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- d. pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- e. pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- e. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Kepala Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- e. pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi pimpinan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi pimpinan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi pimpinan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi pimpinan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Protokol, komunikasi pimpinan, serta publikasi dan dokumentasi pimpinan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati didukung oleh aparatur yang cukup. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang memiliki pegawai sebanyak 150 orang. Di luar Sekretaris Daerah (1 orang) dan Staf Ahli (2 orang), dari jumlah pegawai tersebut, sebanyak 34 orang (22,22%) merupakan pegawai di Asisten Pemerintahan dan Kesra, sebanyak 35 orang (22,88%) merupakan pegawai di Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sebanyak 81 orang (52,94%) merupakan pegawai di Asisten Administrasi Umum.

Jumlah pegawai selaku pejabat Eselon II sebanyak 4 pegawai yaitu Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, serta 2 Staf Ahli. Eselon III sebanyak 10 orang sebagai kepala bagian dan dan Eselon IV sebanyak 29 orang sebagai kepala subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Pelaksana sebanyak 153 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

NO	URAIAN	JML	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		ESELON V		JUMLAH	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretaris Daerah	1	1								1	-
2	Staf Ahli	2	2								2	-
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	1		1							-	1
4	Bagian Tata Pemerintahan	17			1		1	2	6	7	8	9
5	Bagian Hukum	9			1		2	1	2	3	5	4
6	Bagian Kesra	7			1		1	2	1	2	3	4
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-									-	-
8	Bagian Perekonomian	9				1	3		1	4	4	5
9	Bagian Administrasi Pembangunan	13			1		1	2	7	2	9	4
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	13			1		2		9	1	12	1
11	Asisten Administrasi Umum	-									-	-
12	Bagian Organisasi	9				1	2	1		5	2	7
13	Bagian Umum	44			1		2	1	32	8	35	9
14	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	16			1		3		3	9	7	9
15	Bagian Perencanaan dan Keuangan	12				1	1	2	2	6	3	9
	JUMLAH	153	3	1	7	3	18	11	63	47	91	62

Sumber : Bagian Organisasi Setda Tahun 2021

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

NO	URAIAN	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah		1						1
2	Staf Ahli		2						2
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra		1						1
4	Bagian Tata Pemerintahan		7	3	1	6			17
5	Bagian Hukum		4	4		1			9
6	Bagian Kesra		2	3		2			7
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan								-
8	Bagian Perekonomian		2	5	1	1			9
9	Bagian Administrasi Pembangunan		2	7		4			13
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		3	8		2			13

NO	URAIAN	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
11	Asisten Administrasi Umum								-
12	Bagian Organisasi		6	3					9
13	Bagian Umum		3	12	2	26	1		44
14	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		2	7	3	4			16
15	Bagian Perencanaan dan Keuangan		3	6	1	2			12
	JUMLAH		38	58	8	48	1	0	153

Sumber : Bagian Organisasi Setda Tahun 2021

Dari seluruh jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, sebanyak 0 orang berpendidikan S3 (0,00%), 38 orang (24,84%) memiliki pendidikan S2, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 58 orang (37,91%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 8 orang (5,23%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 48 orang (31,37%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 1 orang (%), sedangkan yang memiliki pendidikan SD tidak ada.

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melayani proses pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi, dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah tergambar dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

	KUANTITAS	KUALITAS
Gedung	3	Baik
Ruang Kantor	16	Baik
Ruang Pertemuan	6	Baik
Kendaraan Bermotor		
Mobil	62	Baik

	KUANTITAS	KUALITAS
Sepeda Motor	65	Baik
Peralatan Kantor		
Meja Kursi	Memadai	Baik
Perangkat Komputer	148	Baik
Perangkat Laptop	108	Baik
Perangkat Tablet	10	Baik
Jaringan Kelistrikan	Memadai	Baik
Jaringan Komunikasi	Memadai	Baik
Jaringan Internet	Memadai	Baik

Sumber data BMD Setda 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

Fungsi sekretariat daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan erat dengan terwujudnya Capaian kinerja daerah yang termuat dalam RPD, hal ini juga sebagai Indikator Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026. Capaian indikator kinerja Sekretariat selama 2 tahun masa pembangunan namun secara umum dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PATI

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Indikator Tujuan												
1	Nilai LKjIP	60,00	62,00	64	66,00	61,94	63,26	63,26	65,04	103,23	102,03	98,84	98,55
2	Nilai IKM	3,20	3,30	3,4	3,45	3,07	3,30	3,3	3,4	95,94	100,00	97,06	98,55
	Indikator Sasaran												
1	Persentase OPD yang nilai AKIPnya berkriteria baik	55,00	60,00	70,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	181,82	166,67	142,86	125,00
2	Nilai LPPD	3-4	3-4	3-4	3-4	3,47	3,31	3,55	3,55	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase peraturan Daerah yang disetujui bersama dengan dewan	91,00	92,00	94,00	96,00	160,00	142,85	88,8	78,57	175,82	155,27	94,47	81,84

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
4	Persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	91,00	93,00	95,00	97,00	100,00	103,31	100,00	100,00	109,89	111,09	105,26	103,09
	Indikator Program												
1	Persentase Ketercukupan pelayanan persuratan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,98	100,00	100,00	100,00	99,98	100,00	100,00
2	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	70,00	75,00	80,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	142,86	133,33	125,00	117,65
3	Persentase ketersediaan pakaian dinas aparatur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase bagian yang telah melaksanakan peningkatan sumberdaya aparatur	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
5	Persentase terselesaikannya laporan Keuangan dan dokumen keuangan	100,00	100,00	100,00	100,00	92,31	100,00	100,00	100,00	92,31	100,00	100,00	100,00
6	Persentase agenda kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlaksana	100,00	100,00	100,00	100,00	96,80	100,00	100,00	100,00	96,80	100,00	100,00	100,00
7	Persentase penanganan kasus hukum aparatur dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra	75,00	77,00	79,00	81,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	129,87	126,58	123,46
9	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang ekonomi	75,00	77,00	79,00	81,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	129,87	126,58	123,46
10	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang organisasi dan SDM	91,00	92,00	93,00	94,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	108,70	107,53	106,38

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
11	Persentase peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah (perda, perbup, instruksi, bupati, SE)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase penyediaan analisis kebijakan Tapem	91,00	92,00	93,00	94,00	99,51	99,05	100,00	100,00	109,35	107,66	107,53	106,38
13	Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase penyelesaian lelang oleh pokja ULP	95,00	96,00	97,00	98,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	104,17	103,09	102,04

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke				Rasio Capaian pada Tahun ke			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
15	Persentase saluran informasi publik yang aktif	95,00	96,00	98,00	99,00	88,82	103,09	100,00	100,00	93,49	107,39	102,04	101,01
16	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan di atas 90%	91,00	93,00	95,00	97,00	0,00	100,00	78,43	87,75	0,00	107,53	82,56	90,46
17	Persentase verifikasi draft dokumentasi hukum	91,00	92,00	94,00	96,00	100,00	100,00	99,36	99,04	109,89	108,70	105,70	103,17

Pada tahun 2018 ada beberapa Realisasi Capaian Program persentasenya 0,00% yang memang tidak ada dan baru ada pada tahun 2019 seterusnya. Program tersebut adalah Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra, Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang ekonomi, Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang organisasi dan SDM, Persentase peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah (perda, perbup, instruksi, bupati, SE), Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE), Persentase penyelesaian lelang oleh pokja ULP, dan yang terakhir Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan di atas 90%.

2.3.1 Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya maka disusun kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam program-program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah mulai periode tahun 2023-2026. Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati periode tahun 2018 sampai 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
JENIS PELAYANAN DAN PERKIRAAN ANGGARAN

N O	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				RATA - RATA PERTUMBUHAN			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan 1 : Mewujudkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten																	
Sasaran 1 : Meningkatkan koordinasi pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Pati																	
1	Program Perekonomi an dan Pembangun an	2.381.697.000	6.108.761.000	1.162.784.150	1.371.309.800	2.238.662.147	1.899.508.906	1.013.825.987	1.041.425.138	93,99	31,09	87,19	75,94	156,49	-15,15	-46,63	2,72
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas perumusan Kebijakan Pemerintah daerah																	
2	Program Pemerintah an dan Kesejahtera an Rakyat	12.313.641.000	20.156.260.000	7.082.422.650	9.730.800.000	9.428.103.017	9.343.181.831	5.991.519.903	8.867.905.950	76,57	46,35	84,60	91,13	63,69	-0,90	-35,87	48,01
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Instansi pemerintah																	
Sasaran 3 : Meningkatkan pelayanan administrasi pembangunan dan pelayanan publik																	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten Pati	12.227.129.000	15.045.050.000	13.725.444.200	32.497.969.200	17.643.192.618	15.091.900.570	12.586.163.205	29.618.281.250	144,30	100,31	91,70	91,14	23,05	-14,46	-16,60	135,32
JUMLAH		26.922.467.000	41.310.071.000	21.970.651.000	43.600.079.000	29.309.957.782	26.334.591.307	19.591.509.095	39.527.612.338	108,87	63,75	89,17	90,66	53,44	-46,82	98,45	-32,78

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa sistem perencanaan di Sekretariat Daerah periode tahun 2018-2022 belum menunjukkan perencanaan yang sudah menggambarkan dan berbasis pada pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Bahkan kalau dilihat dari program-program yang dilaksanakan merupakan program-program teknis yang tidak merupakan fungsi dari Sekretariat Daerah, dan harusnya program tersebut dilakukan oleh dinas teknis terkait. Sedangkan pendanaannya sudah mencukupi namun tidak konsisten dari tahun ke tahun sehingga pencapaian hasilnya sulit untuk dapat diukur.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
2.4.1 Analisis RENSTRA K/L dan Provinsi terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

Tabel 2.6

Analisis Renstra K/L dan Provinsi untuk Perumusan Tantangan dan Peluang Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

NO	KEMENDAGRI	SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	TANTANGAN	PELUANG
	10 Output Strategis Renstra Kemendagri 2020-2024	IKU Setda Provinsi Jateng		
1	Menciptakan SDM yang unggul,	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat pada akhir periode renstra adalah 85%. Target selama 5 Tahun renstra flat 85% memberi tantangan baru karena baseline (kondisi awal kinerja) pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada	Belum optimalnya persentase OPD yang nilai AKIPnya berkriteria baik	OPD yang nilai AKIP nya berkriteria baik lebih besar daripada yang belum, sehingga memberikan pengaruh yang baik pada OPD yang belum optimal capaiannya

NO	KEMENDAGRI	SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	TANTANGAN	PELUANG
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi pada akhir periode renstra adalah 85%. Target selama 5 Tahun renstra flat 85% memberi tantangan baru karena baseline (kondisi awal kinerja) pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada	Belum optimalnya kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Potensi SDM ASN dan perkembangan teknologi informasi memberi harapan untuk bisa mengoptimalkan capaian kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan pada akhir periode renstra adalah 85%. Target selama 5 Tahun renstra flat 85% memberi tantangan baru karena baseline (kondisi awal kinerja) pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada		

NO	KEMENDAGRI	SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	TANTANGAN	PELUANG
2	Melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendongkrak pembangunan ekonomi	Persentase keberhasilan pelaksanaan kebijakan Strategis Bidang Perekonomian pada akhir periode renstra adalah 95%. Target awal renstra tahun 2019 menyebutkan target 85%, terdapat 10% kenaikan yang diharapkan di akhir renstra.	Belum optimalnya kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Potensi SDM ASN dan perkembangan teknologi informasi memberi harapan untuk bisa mengoptimalkan capaian kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi pada akhir renstra ditargetkan 100% dan flat selama 5 Tahun. Mempertahankan capaian tersebut menjadi tantangan selama 5 Tahun. Peluang muncul dari track record capaian yang selalu 100% tiap tahunnya memungkinkan indikator ini tercapai sesuai harapan.		

NO	KEMENDAGRI	SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	TANTANGAN	PELUANG
3	Membuka keterisolasian serta konektivitas, kemudian menyederhanakan regulasi			
4	Reformasi birokrasi	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B dari target awal renstra adalah 73% dengan kondisi awal (Baseline) tahun 2018 sudah tercapai 73%. Pada akhir periode renstra diharapkan bisa tercapai 92%. Hal ini tentunya dibutuhkan kerja keras untuk pencapaian target tersebut.	Belum optimalnya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		Persentase Kabupaten /kota yang meningkat indeks RB nya pada akhir Renstra adalah 85% dari baseline yang cukup rendah yaitu 11% pada tahun 2017 tentunya membutuhkan usaha yang keras dengan range target yang cukup lebar.		

NO	KEMENDAGRI	SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	TANTANGAN	PELUANG
5	Pembinaan stabilitas politik dalam negeri.	Persentase Kebijakan yang Efektif pada target awal periode renstra adalah 80% dan pada akhir periode adalah 84%	Sekretariat Daerah harus mampu mempertahankan target persentase kebijakan	Meningkatnya koordinasi sekretariat daerah dengan OPD dan Stakeholder terkait dengan efektif
6	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.	Target Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi flat selama 5 tahun yaitu 85%.	Sekretariat Daerah harus mampu mempertahankan target persentase bidang pemerintahan	Potensi SDM ASN dan perkembangan teknologi informasi memberi harapan untuk bisa mengoptimalkan capaian Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Target Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD adalah flat 100%, berarti membutuhkan usaha mempertahankan selama kurun waktu tersebut agar optimal 100% tercapai.	Belum optimalnya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	

NO	KEMENDAGRI	SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	TANTANGAN	PELUANG
7	Memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.	Target renstra untuk indikator Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/ Kota flat 100% selama 5 tahun.	Belum optimalnya Penataan Administrasi Pemerintahan	Potensi SDM ASN dan perkembangan teknologi informasi memberi harapan untuk bisa mengoptimalkan capaian Penataan Administrasi Pemerintahan
8	Pelayanan publik	Target awal renstra untuk indikator Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik yaitu 52,1% dan 100% pada akhir tahun renstra	Masih Belum optimalnya persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	Sinergi antara Pusat dan Daerah memberikan harapan dan peluang bagi pengoptimalan pelayanan publik bagi OPD
		Target awal renstra untuk indikator Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda adalah 75% dan 80% pada akhir tahun renstra.		
		Target awal indikator Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan, dan kehumasan adalah 75% dan berakhir dengan target 80% .	Masih Belum optimalnya persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat	Potensi SDM ASN dan perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan informasi publik memberi harapan untuk bisa mengoptimalkan saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat

NO	KEMENDAGRI	SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	TANTANGAN	PELUANG
9	Kemudahan berusaha dan investasi daerah.	indikator Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif mempunyai target dari 70% sampai dengan 90% di akhir renstra membutuhkan usaha keras untuk mencapai kenaikan 20% selama 5 Tahun tersebut.		
10	Penataan wilayah dan pembangunan daerah.	Target indikator Persentase rekomendasi kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, wilayah, pelaporan, dan analisis yang terealisasi adalah flat 85% selama 5 Tahun Renstra	Masih Belum optimalnya persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	Sinergi antara Pusat dan Daerah memberikan harapan dan peluang bagi pengoptimalan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi
		Target indikator Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan SDA pada awal renstra adalah 80 dan di akhir renstra adalah 96%		

NO	KEMENDAGRI	SETDA PROVINSI JAWA TENGAH	TANTANGAN	PELUANG
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan SDA yang dievaluasi di targetkan 80% di awal renstra dan 96% di akhir renstra.		
		Target awal renstra Persentase Efektifitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa adalah 60% dan di akhir adalah 70%	Belum optimalnya penyelesaian pemilihan penyedia (tender) oleh UKPBJ	Potensi SDM ASN dan perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan informasi memberi harapan untuk bisa mengefisienkan pengadaan barang/jasa pemerintah

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

Fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan perwujudan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Fungsi tersebut menopang kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan di Daerah. Beberapa capaian kinerja yang menandai kualitas tata kelola pemerintahan belum optimal, antara lain terkait Nilai SAKIP. Sedangkan tingkat keberhasilan koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik digambarkan dengan IKM. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah :

Tabel 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum optimalnya peran Setda sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Koordinasi terkait kinerja urusan Kesejahteraan Rakyat belum optimal	Pemantauan dan evaluasi kinerja urusan Kesejahteraan Rakyat belum optimal
	Fasilitasi Kerjasama daerah dalam mendukung pembangunan belum optimal	Koordinasi terkait kerjasama daerah belum optimal
		Masih banyak potensi kerjasama daerah yang perlu ditindaklanjuti
		Kerjasama daerah yang sudah ada belum berjalan optimal
	Koordinasi dan evaluasi terkait kinerja urusan terkait Perekonomian dan SDA belum optimal	Pemantauan dan evaluasi kinerja urusan terkait Perekonomian dan SDA belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Koordinasi dan evaluasi dalam mendukung pembangunan daerah belum optimal	Pengendalian pembangunan Infrastruktur (Pembangunan Fisik) dan Non Infrastruktur belum optimal
	Koordinasi kegiatan yang terkait dengan OPD lain belum optimal	Koordinasi terkait media publikasi dengan Diskominfo belum optimal
		Koordinasi terkait permasalahan batas desa dan konflik pertanahan dengan OPD terkait belum optimal

Tabel 3.2

Telaah RENSTRA K/L dan Provinsi untuk Perumusan Faktor Penghambat dan Pendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Pati

No.	Kemendagri	Setda Provinsi Jawa Tengah	Penghambat	Pendorong
	10 Output Strategis Renstra Kemendagri 2020-2024	IKU Setda Provinsi Jateng		
1	Menciptakan SDM yang unggul.	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat pada akhir periode renstra adalah 85%. Target selama 5 Tahun renstra flat 85% memberi tantangan baru karena baseline (kondisi awal kinerja) pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada	Belum optimalnya peraturan bidang kesra yang sudah ditindak lanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegda ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD; b.bahwa berdasarkan rapat Paripurna DPRD Kabupaten telah

No.	Kemendagri	Setda Provinsi Jawa Tengah	Penghambat	Pendorong
				ditetapkan Program Pembentukan Perda Kabupaten ; Ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tentang Program Pembentukan Perda Kabupaten Pati
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi pada akhir periode renstra adalah 85%. Target selama 5 Tahun renstra flat 85% memberi tantangan baru karena baseline (kondisi awal kinerja) pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan pada akhir periode renstra adalah 85%. Target selama 5 Tahun renstra flat 85% memberi tantangan baru karena baseline (kondisi awal kinerja) pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada	Belum optimalnya penyediaan analisis kebijakan bidang kesra	Terdapat 1 Kegiatan dan berisi 5 Sub Kegiatan dalam DPA Sekretariat Daerah yang bisa mendorong penyediaan analisis kebijakan bidang kesra

No.	Kemendagri	Setda Provinsi Jawa Tengah	Penghambat	Pendorong
2	Melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendongkrak pembangunan ekonomi	Persentase keberhasilan pelaksanaan kebijakan Strategis Bidang Perekonomian pada akhir periode renstra adalah 95%. Target awal renstra tahun 2019 menyebutkan target 85%, terdapat 10% kenaikan yang diharapkan di akhir Renstra	Belum optimalnya peraturan bidang ekonomi yang sudah ditindak lanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegda ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD; b. bahwa berdasarkan rapat Paripurna DPRD Kabupaten telah ditetapkan Program Pembentukan Perda Kabupaten ; Ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tentang Program Pembentukan Perda Kabupaten Pati

No.	Kemendagri	Setda Provinsi Jawa Tengah	Penghambat	Pendorong
		<p>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi pada akhir renstra ditargetkan 100% dan flat selama 5 Tahun. Mempertahankan capaian tersebut menjadi tantangan selama 5 Tahun. Peluang muncul dari track record capaian yang selalu 100% tiap tahunnya memungkinkan indikator ini tercapai sesuai harapan.</p>	<p>Belum optimalnya penyediaan analisis kebijakan bidang ekonomi</p>	<p>Terdapat 1 Kegiatan dan berisi 3 Sub Kegiatan dalam DPA Sekretariat Daerah yang bisa mendorong penyediaan analisis kebijakan bidang ekonomi</p>
3	<p>Membuka keterisolasian serta konektivitas, kemudian menyederhanakan regulasi</p>			

No.	Kemendagri	Setda Provinsi Jawa Tengah	Penghambat	Pendorong
4	Reformasi birokrasi	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B dari target awal renstra adalah 73% dengan kondisi awal (Baseline) tahun 2018 sudah tercapai 73%. Pada akhir periode renstra diharapkan bisa tercapai 92%. Hal ini tentunya dibutuhkan kerja keras untuk pencapaian target tersebut.	Belum optimalnya penyediaan analisis kebijakan bidang Orgainisasi dan SDM	Adanya sub kegiatan peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi dalam DPA Sekretariat Daerah yang bisa mendorong penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM

No.	Kemendagri	Setda Provinsi Jawa Tengah	Penghambat	Pendorong
		Persentase Kabupaten /kota yang meningkat indeks RB nya pada akhir Renstra adalah 85% dari baseline yang cukup rendah yaitu 11% pada tahun 2017 tentunya membutuhkan usaha yang keras dengan range target yang cukup lebar.	Belum optimalnya peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah	a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegda ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD; b.bahwa berdasarkan rapat Paripurna DPRD Kabupaten telah ditetapkan Program Pembentukan Perda Kabupaten ; Ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tentang Program Pembentukan Perda Kabupaten Pati

No.	Kemendagri	Setda Provinsi Jawa Tengah	Penghambat	Pendorong
5	Pembinaan stabilitas politik dalam negeri.	Persentase Kebijakan yang Efektif pada target awal periode renstra adalah 80% dan pada akhir periode adalah 84%	Belum optimalnya persentase peraturan daerah yang disetujui bersama dengan Dewan	
6	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.	Target Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi flat selama 5 tahun yaitu 85%.	Belum optimalnya peraturan bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah yang sudah ditindak lanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegda ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD; b. bahwa berdasarkan rapat Paripurna DPRD Kabupaten telah ditetapkan Program Pembentukan Perda Kabupaten ; Ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tentang Program Pembentukan Perda Kabupaten Pati

No.	Kemendagri	Setda Provinsi Jawa Tengah	Penghambat	Pendorong
		Target Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD adalah flat 100%, berarti membutuhkan usaha mempertahankan selama kurun waktu tersebut agar optimal 100% tercapai.	Belum optimalnya penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	Terdapat 1 Kegiatan dan berisi 3 Sub Kegiatan dalam DPA Sekretariat Daerah yang bisa mendorong penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan
7	Memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.	Target renstra untuk indikator Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/ Kota flat 100% selama 5 tahun.		
8	Pelayanan Publik	Target awal renstra untuk indikator Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik yaitu 52,1% dan 100% pada akhir tahun renstra	Masih Belum optimalnya persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	

No.	Kemendagri	Setda Provinsi Jawa Tengah	Penghambat	Pendorong
		Target awal renstra untuk indikator Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda adalah 75% dan 80% pada akhir tahun renstra.	Belum optimalnya agenda kerja kepala daerah/ wakil kepala daerah yang terlaksana	unsur SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana prasarana IT yang memadai
			Belum optimalnya pengaduan masyarakat dan kasus hukum yang ditindak lanjuti	unsur SDM yang kompeten di bidang hukum dan ketersediaan sarana prasarana pengaduan yang memadai
			Masih Belum optimalnya penanganan kasus hukum aparatur	unsur SDM yang kompeten di bidang hukum dan ketersediaan sarana prasarana penanganan kasus yang memadai
		Targe awal indikator Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan, dan kehumasan adalah 75% dan berakhir dengan target 80% .	Masih Belum optimalnya persentase saluran informasi publik pemerintah yang aktif diakses masyarakat	Potensi 5 Saluran informasi publik pemerintah, unsur SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana prasarana IT yang memadai

No.	Kemendagri	Setda Provinsi Jawa Tengah	Penghambat	Pendorong
9	Kemudahan berusaha dan investasi daerah.	indikator Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif mempunyai target dari 70% sampai dengan 90% di akhir renstra membutuhkan usaha keras untuk mencapai kenaikan 20% selama 5 Tahun tersebut.	Fasilitasi Kerjasama daerah dalam mendukung pembangunan belum optimal	Baseline capaian kinerja daerah sudah baik
10	Penataan wilayah dan pembangunan daerah.	Target indikator Persentase rekomendasi kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, wilayah, pelaporan, dan analisis yang terealisasi adalah flat 85% selama 5 Tahun renstra	Masih Belum optimalnya persentase pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tertib administrasi	
		Target indikator Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan SDA pada awal renstra adalah 80 dan di akhir renstra adalah 96%	Belum optimalnya pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	unsur SDM ditiap SKPD yang kompeten dan ketersediaan sarana prasarana IT yang memadai

No.	Kemendagri	Setda Provinsi Jawa Tengah	Penghambat	Pendorong
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan SDA yang dievaluasi di targetkan 80% di awal renstra dan 96% di akhir renstra.		
		Target awal renstra Persentase Efektifitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa adalah 60% dan di akhir adalah 70%	Belum optimalnya peraturan bidang pengadaan barang /jasa yang sudah ditindak lanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	Peraturan pengadaan mengikuti yang ada di pusat
			Belum optimalnya penyelesaian lelang oleh pokja ULP	unsur SDM yang kompeten dan ketersediaan sarana prasarana IT yang memadai

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Dalam setiap tujuan memiliki sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi memiliki indikator sebagai alat ukur keberhasilan yang berorientasi hasil (*outcome-impact*). Rumusan Isu strategis, Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati 2023-2026.

Ada 4 (empat) isu strategis pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati 2023-2026 yang diangkat yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat;
4. Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada Penguatan Fungsi Birokrasi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan isu strategis selanjutnya kondisi akhir yang hendak dicapai. Kondisi yang akan dicapai tersebut dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan) dengan indikator,
 - Laju Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian;
 - Laju Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Industri Pengolahan; dan
 - Laju Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Perdagangan.
 - 1.2 Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat dengan indikator,
 - PDRB Perkapita ADHB; dan
 - PDRB Perkapita ADHK.
 - 1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah dengan indikator,
 - Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik.
 - 1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator,
 - Indeks Ketimpangan Pendapatan (versi Word Bank).
 - 1.5 Meningkatnya Kondusifitas wilayah dengan indikator,
 - Angka Kriminalitas.
 - 1.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator,
 - IKLH; dan
 - Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB.
2. Menurunnya pengangguran, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 2.1 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan indikator,
 - Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja.
 - 2.2 Meningkatnya kesempatan atau peluang kerja dengan indikator,
 - TPAK.
3. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin dengan indikator,
 - Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1); dan

- Indeks Keparahana Kemiskinan.
- 3.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar dengan indikator,
 - Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum;
 - Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi;
 - Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Kesehatan Dasar; dan
 - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
- 4. Meningkatnya kualitas hidup penduduk, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator,
 - Angka Harapan Hidup.
 - 4.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses Pendidikan dengan indikator,
 - Angka Rata-rata Lama Sekolah; dan
 - Angka Harapan Lama Sekolah.
 - 4.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat dengan indikator,
 - Pengeluaran Per Kapita.
- 5. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya kesetaraan dan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan dengan indikator,
 - Rasio Angka Harapan Hidup antara Perempuan dan Laki-laki;
 - Rasio Rata-rata Lama Sekolah antara Perempuan dan Laki-laki;
 - Rasio Harapan Lama Sekolah antara Perempuan dan Laki-laki;
 - Rasio Pengeluaran Per Kapita antara Perempuan dan Laki-laki; dan
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
- 6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik dengan indikator,
 - IKM.
 - 6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten dengan indikator,
 - Nilai SAKIP;
 - Indeks Profesionalisme ASN;
 - Nilai Maturitas SPIP;
 - MRI (Indeks Manajemen Resiko);
 - Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
 - Indeks SPBE; dan
 - IPKD
 - 6.3 Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah dengan indikator,
 - Desentralisasi fiskal;
 - Rasio Ketergantungan Fiskal; dan
 - Rasio Kemandirian Fiskal.

Demikian dari isu strategis, tujuan, sasaran dan indikator Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati 2023-2026, sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 2023-2026 mempunyai isu strategis Peningkatan Peran Setda dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik dengan indikator Persentase Tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah, Nilai SAKIP dan Nilai IKM serta 3 sasaran sebagai berikut :
 - 1.1 Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator,
 - Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - 1.2 Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator,
 - Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan.
 - 1.3 Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda dengan indikator,
 - IKM Sekretariat Daerah.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Rancangan Strategis milik Kementerian Dalam Negeri mempunyai 3 Tujuan dan 12 Sasaran beserta indikatornya, berikut penjelasan dibawah :

1. Tujuan pertama adalah Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa yang mempunyai sasaran :

- a. Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia dengan indikator,
 - Indeks Demokrasi Indonesia, dengan baseline pada tahun 2018 (72,39), mengambil Indikasi Target untuk tahun 2020 (77,36) dan tahun 2024 (78,66).
 - Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu, dengan baseline Pilkada pada tahun 2018 (75%), Pilkada pada tahun 2019 (81%) mengambil Indikasi Target untuk tahun 2020 (77,50%) dan tahun 2024 (79,50%) yang sesuai dalam Pemilu RPJMN.
 - Indeks Kinerja Ormas, dengan baseline (N/A), mengambil Indikasi Target untuk tahun 2020 (-*) dan tahun 2024 (Nolai 70).

Ketiga poin indikator diatas mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

- b. Meningkatkan Implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator,
 - Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi, dengan baseline (Nilai 2,38), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (Nilai 2,38) dan tahun 2024 (Nilai 2,40) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM), dengan baseline pada tahun 2018 (67,01), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (67,10) dan tahun 2024 (67,50) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi, dengan baseline (Nilai 2,860), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (Nilai 2,865) dan tahun 2024 (Nilai 2,885) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan.
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra, dengan baseline (Nilai 2,305), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (Nilai 2,310) dan tahun 2024 (Nilai 2,330) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- c. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dengan indikator,
 - Indeks Kewaspadaan Nasional, dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (-*) dan tahun 2024 (64) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- d. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan indikator,
 - Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”, dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (-*) dan tahun 2024 (150 daerah) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan.
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas, dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (-*) dan tahun 2024 (Nilai 60) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan.
- 2. Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi yang mempunyai sasaran :
 - a. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM dan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dengan indikator,
 - Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun, dengan

- baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (15%) dan tahun 2024 (80%) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri, dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 pada Level 3 (75%) dan tahun 2024 pada Level 3 (100%) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.
 - Tingkat Kapabilitas PPUPD secara Nasional, dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 pada Level 3 (75%) dan tahun 2024 pada Level 3 (100%) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.
 - Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni, dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (Nilai 3,00) dan tahun 2024 (Nilai 3,60) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.
- b. Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah dengan indikator,
- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (-*) dan tahun 2024 sangat tinggi yaitu (Nilai 85) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator,
- Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (-*) dan tahun 2024 sangat tinggi (Nilai 85) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.

- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan baseline nilai cukup (Nilai 2,8), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 cukup (Nilai 2,85) dan tahun 2024 sangat tinggi (Nilai 3,2) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.
- Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (30%) dan tahun 2024 (100%) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.
- Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (-*) dan tahun 2024 sangat sinkron (Nilai 80) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "baik" dengan baseline (10%), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (10%) dan tahun 2024 (75%) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan baseline (Nilai 35,90), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (Nilai 36) dan tahun 2024 (Nilai 37) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.
- Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (-*) dan tahun 2024 (36%) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.
- Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama" dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (55 Daerah) dan tahun 2024 (165 Daerah) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.

- Indeks Pengawasan Pemerintah Daerah dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (Nilai 80) dan tahun 2024 (Nilai 100) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.
- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (-*) dan tahun 2024 pada *grade* A (Nilai 90) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.

d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator,

- Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan baseline (90% cakupan kepemilikan), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (90% cakupan kepemilikan) dan tahun 2024 (100% cakupan kepemilikan).
- Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif) dengan baseline (1623 Lembaga Pengguna), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (1923 Lembaga Pengguna) dan tahun 2024 (3123 Lembaga Pengguna).

Kedua poin indikator diatas mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan dengan indikator,

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (-*) dan tahun 2024 (Nilai 60) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

3. Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi yang mempunyai sasaran :

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan indikator,
 - Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dengan baseline (75,43), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (85,01) dan tahun 2024 (93,01) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas dengan indikator,
 - Indeks Pengawasan Internal dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (Nilai 80) dan tahun 2024 (Nilai 100) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.
 - Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (Nilai 80) dan tahun 2024 (Nilai 85) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan indikator,
 - Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dengan baseline (N/A), mengambil indikasi target untuk tahun 2020 (40%) dan tahun 2024 (65%) yang mempunyai kesesuaian terhadap sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yaitu Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan dilingkungan internal dan eksternal Setda.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sekretariat Daerah yang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai koordinator dan regulator pada peranan aktif dalam implementasi RTRW di Kabupaten Pati. Hal ini terdapat pada sasaran kedua dalam Rencana Strategis, yaitu **Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan**. RTRW di Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010-2030.

Dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, menyebutkan indikasi program RTRW Kabupaten Pati. Indikasi program tersebut meliputi :

1. Perwujudan Struktur Ruang
2. Perwujudan Pola Ruang
3. Perwujudan Kawasan Strategis

Pertama, dalam Perwujudan Struktur Ruang terdapat dua sistem yang meliputi sistem perkotaan dan perwujudan sistem jaringan prasarana. Kedua, untuk Perwujudan Pola Ruang terdiri atas Perlindungan Kawasan Lindung dan Perwujudan Kawasan Budi Daya. Ketiga, untuk Perwujudan Kawasan Strategis meliputi Perwujudan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi dan Perwujudan Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam atau Teknologi Tinggi.

Sumber pendanaan untuk mewujudkan indikasi program RTRW Kabupaten Pati meliputi APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten, serta melibatkan pihak Swasta. Untuk itu perlu penyelarasan dalam masing-masing sumber pendanaan tersebut, termasuk dalam penyelarasan dalam Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Dalam Sasaran Kedua Renstra Sekretariat Daerah menyebutkan bahwa “Meningkatnya Efektifitas Kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan” selaras dengan ketiga indikasi program RTRW Kabupaten Pati. Keselarasan ini akan ditindaklanjuti dalam tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dalam hal koordinasi capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan dalam penyusunan kebijakan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan

urusan daerah, juga menggambarkan lingkungan strategis supra daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

Demikian Isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pati tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Hukum dalam melakukan koordinasi dengan OPD dalam rumpun masing-masing;
2. Meningkatkan peran bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa dalam melakukan koordinasi dengan OPD dalam rumpun masing-masing; dan
3. Meningkatkan peran bagian Organisasi dan Protokol, Komunikasi Pimpinan dalam pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Sekretariat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan empat tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pati telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati memiliki Isu Strategis **“Peningkatan Peran Sekretariat Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel”**

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati bertujuan untuk mewujudkan sasaran dalam RPD Tahun 2023-2026 dengan harapan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, berikut ini adalah Tujuan Utama Sekretariat Daerah:

“Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik” pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten tersebut di atas memiliki indikator kinerja yang tercantum dan mendukung capaian kinerja RPD yaitu upaya peningkatan Capaian Indikator Kinerja Daerah, Nilai SAKIP dan Nilai IKM. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan tugas dari Sekretariat Daerah untuk empat tahun ke depan agar dapat tercapai minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan dapat mencapai nilai lebih.

Untuk dapat mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan maka harus ditetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga sasaran berdampak dalam pencapaian dari tujuan.

4.2 Sasaran

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Bertitik tolak dari tujuan dan beserta indikatornya yang telah ditetapkan maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menetapkan tiga pokok sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan tahun 2023-2026. Tiga pokok sasaran utama yang ditetapkan dan hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan;
- 3) Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda;

Untuk lebih terperinci tujuan, sasaran, indikator tujuan/indikator sasaran serta target yang hendak dicapai dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik		Persentase Tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP	65,04	65,50	65,70	66,00
		Nilai IKM	3,41	3,42	3,44	3,45
	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda	IKM SETDA	3,52	3,53	3,54	3,55

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan (Permendagri Nomor 050 Tahun 2021). Sementara itu, arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, dan konsisten. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan kebijakan dapat dirumuskan dengan cara analisis kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal dari pada itu diketahui kondisi Sekretariat daerah sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah :

- a. Struktur organisasi yang jelas
- b. Adanya kewenangan pengelolaan administrasi pemerintahan;
- c. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;
- d. Tersedianya sumber daya aparatur yang cukup dari segi jumlahnya;
- e. Adanya dukungan penuh dari pimpinan daerah.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensinya masih sedikit;
- b. Belum meratanya penempatan aparatur yang sesuai dengan beban kerja;
- c. Belum optimalnya kinerja pegawai/aparatur;
- d. Belum tersedianya data base dari masing-masing OPD;
- e. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bagian;
- f. Besarnya volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah yang ada sehingga menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang (Opportunities)

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang-peluang yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global yang pesat, memberikan peluang untuk peningkatan dan kecepatan dalam penyelesaian tugas-tugas serta promosi daerah;
- b. Adanya dukungan dari bupati selalu kepala daerah dan DPRD selaku Lembaga legislative;
- c. Adanya dukungan dari masyarakat yang kuat akan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur.

2. Ancaman (*Threat*)

Munculnya peluang di berbagai sektor akan menjadi suatu tantangan bagi Sekretariat Daerah. Tantangan yang harus dijawab adalah sebagai berikut:

- a. Sistem politik dan hukum yang belum terbangun secara mapan;
- b. Kebijakan dan regulasi pemerintah yang selalu berubah-ubah;
- c. Era globalisasi dan keterbukaan publik;
- d. Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan yang masih kurang efektif dan efisien.

5.1 Strategi

Sekretariat Daerah, kabupaten Pati merencanakan serangkaian strategi yang akan dijalankan selama 4 (empat) tahun ke depan untuk mewujudkan Rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten.

Rumusan strategi yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi terkait kinerja urusan Kesejahteraan Rakyat;
2. Fasilitasi Kerjasama daerah dalam mendukung pembangunan;
3. Koordinasi dan evaluasi terkait kinerja urusan terkait Perekonomian dan SDA;
4. Koordinasi dan evaluasi dalam mendukung pembangunan daerah; dan
5. Koordinasi kegiatan yang terkait dengan OPD lain.

5.2 Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi untuk mencapai tujuan. Sekretariat Daerah dalam mewujudkan Rumusan

kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten serta Meningkatkan kualitas pelayanan publik Instansi pemerintah sesuai dengan sasaran-sasarannya mengambil kebijakan selama 2023-2026 sebagai berikut yaitu:

1. Pemantauan dan evaluasi kinerja urusan Kesejahteraan Rakyat;
2. Koordinasi terkait kerjasama daerah;
3. Masih banyak potensi kerjasama daerah;
4. Kerjasama daerah yang sudah ada;
5. Pemantauan dan evaluasi kinerja urusan terkait Perekonomian dan SDA;
6. Pengendalian pembangunan Infrastruktur (Pembangunan Fisik) dan Non Infrastruktur;
7. Koordinasi terkait media publikasi dengan Diskominfo; dan
8. Koordinasi terkait permasalahan batas desa dan konflik pertanahan dengan OPD.

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat dalam Table 5.

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik	Meningkatnya efektifitas kinerja Urusan Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan Kebijakan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	Terwujudnya peraturan bidang tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)
			Tersedianya analisis kebijakan bidang tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Terlaksananya verifikasi rancangan / konsep produk hukum daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			Terselesaikannya kasus pada bidang hukum
			Terwujudnya Kerjasama Daerah
	Meningkatnya efektifitas kinerja Urusan Rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Terwujudnya peraturan bidang perekonomian pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)
			Tersedianya analisis kebijakan bidang perekonomian
			Terlaksananya pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%
			Tercapainya pemilihan penyedia (tender) oleh UKPBJ
			Tersedianya analisis kebijakan bidang Sumber Daya Alam
	Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Sekretariat Daerah	Meningkatkan kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Terwujudnya peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah
			Tersedianya analisis kebijakan bidang Organisasi
		Meningkatkan saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif	Terlaksananya saluran informasi publik terkait pimpinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai sasaran untuk menjalankan strategi berdasar pada kebijakan serta mengukur capaian keberhasilan sasaran dan tujuan dengan indikator yang jelas maka perlu disusun Program yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan output yang mendukung capaian outcome sasaran.

Dengan adanya program dan kegiatan beserta nilai pendanaanya diharapkan pula dapat memberikan kerangka yang jelas dalam melaksanakan nya. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah yang direncanakan untuk periode Tahun 2023-2026 adalah Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kabupaten Pati.

Selanjutnya secara detil program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagaimana terlampir dalam Tabel 6.

Tabel 6
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung-jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja baik					Tingkat capaian indikator kinerja daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SETDA
					Nilai SAKIP	Nilai	65,04	65,04	65,50	65,70	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	SETDA	
					Nilai IKM	Indeks	3,40	3,41	3,42	3,44	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	SETDA	
Sasaran : Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Sekretariat Daerah Kab. Pati					IKM Setda	Indeks	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	SETDA	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				45.648.278.000		46.951.638.000		47.671.273.000		48.502.883.000		188.774.072.000	SETDA	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				33.814.402.000		34.965.014.000		35.457.773.000		36.047.883.000		140.285.072.000	SETDA	
						Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	30.160.161.000	100	31.219.553.000	100	31.619.773.000	100	32.080.585.000	100	125.080.072.000	SETDA

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung- jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
						Persentase kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	931.363.000	100	948.339.000	100	958.000.000	100	967.298.000	100	3.805.000.000	SETDA
						Persentase saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif	%	100	100	2.722.878.000	100	2.797.122.000	100	2.880.000.000	100	3.000.000.000	100	11.400.000.000	SETDA
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokum en	5	5	92.000.000	5	97.000.000	5	102.000.000	5	107.000.000	20	398.000.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	3	3	19.000.000	3	20.000.000	3	21.000.000	3	22.000.000	12	82.000.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokum en	1	4	14.000.000	4	15.000.000	4	16.000.000	4	17.000.000	16	62.000.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokum en	1	4	9.000.000	4	10.000.000	4	11.000.000	4	12.000.000	16	42.000.000	SETDA BAG PERENK EU

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung-jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	4	3	40.000.000	3	41.000.000	3	42.000.000	3	43.000.000	12	166.000.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	4	4	10.000.000	4	11.000.000	4	12.000.000	4	13.000.000	16	46.000.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokum en	5	5	16.373.595.000	5	16.409.908.000	5	16.922.000.000	5	17.435.000.000	20	67.140.503.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	157	157	15.968.503.000	160	16.000.000.000	160	16.500.000.000	160	17.000.000.000	160	65.468.503.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	12	14	229.092.000	14	230.908.000	14	240.000.000	14	250.000.000	56	950.000.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Dokum en	12	12	128.000.000	12	129.000.000	12	130.000.000	12	131.000.000	48	518.000.000	SETDA BAG PERENK EU

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung- jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	4	46.000.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD	Lapora n	18	2	38.000.000	2	39.000.000	2	40.000.000	2	41.000.000	8	158.000.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokum en	1	1	70.000.000	1	71.000.000	1	72.000.000	1	73.000.000	4	286.000.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapora n	12	4	70.000.000	4	71.000.000	4	72.000.000	4	73.000.000	16	286.000.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokum en	3	4	884.205.000	4	728.340.000	4	737.880.000	4	759.380.000	16	3.109.805.000	SETDA
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	99.300.000	1	103.800.000	1	91.880.000	1	91.880.000	4	386.860.000	SETDA BAG UMUM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung-jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG URUSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokum en	0	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	12	6.500.000	48	23.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	66	479.905.000	66	319.040.000	66	340.000.000	66	361.000.000	264	1.499.945.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	400	1.200.000.000	SETDA BAG PROKOM PIM
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokum en	9	10	3.629.804.000	10	3.660.608.000	10	3.831.307.000	10	3.923.169.000	40	15.044.888.000	SETDA
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	76.860.000	2	77.140.000	2	78.000.000	2	80.000.000	8	312.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	2	232.074.000	2	237.926.000	2	250.000.000	2	255.000.000	8	975.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	2	53.020.000	2	54.980.000	2	55.000.000	2	55.000.000	8	218.000.000	SETDA BAG UMUM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangk at Daerah Penang gung- jawab
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	7	1.158.644.000	7	1.160.768.000	7	1.168.307.000	7	1.181.169.000	28	4.668.888.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	3	162.000.000	3	165.000.000	3	166.000.000	3	167.000.000	12	660.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokum en	4	4	440.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	460.000.000	16	1.800.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapora n	12	12	637.206.000	12	642.794.000	12	640.000.000	12	650.000.000	48	2.570.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	12	12	850.000.000	12	850.000.000	12	1.000.000.000	12	1.050.000.000	48	3.750.000.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	10	10	20.000.000	10	22.000.000	10	24.000.000	10	25.000.000	40	91.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokum en	2	3	1.735.286.000	3	2.101.126.000	3	1.616.453.000	3	1.120.556.000	12	6.573.421.000	SETDA BAG UMUM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangk at Daerah Penang gung-jawab
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	29	870.000.000	3	1.850.436.000	2	1.405.940.000	2	888.992.000	36	5.015.368.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	10	66.375.000	14	125.690.000	8	73.013.000	7	80.314.000	39	345.392.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	54	3	798.911.000	5	125.000.000	7	137.500.000	7	151.250.000	22	1.212.661.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	4	4	2.523.915.000	4	2.569.585.000	4	2.710.500.000	4	2.916.000.000	16	10.720.000.000	SETDA
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	26.000.000	12	27.000.000	12	28.000.000	12	29.000.000	48	110.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	982.250.000	12	990.250.000	12	997.500.000	12	1.000.000.000	48	3.970.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	83.555.000	12	84.445.000	12	85.000.000	12	87.000.000	48	340.000.000	SETDA BAG UMUM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung-jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	12	12	1.432.110.000	12	1.467.890.000	12	1.600.000.000	12	1.800.000.000	48	6.300.000.000	SETDA BAG PERENK EU
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokum en	6	6	1.769.906.000	6	1.795.889.000	6	1.809.000.000	6	1.845.205.000	24	7.220.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	4	124.360.000	4	135.640.000	4	140.000.000	4	150.000.000	4	550.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	124	124	864.291.000	124	870.709.000	124	875.000.000	124	890.000.000	124	3.500.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	178	178	36.000.000	178	37.000.000	178	38.000.000	178	39.000.000	178	150.000.000	SETDA BAG UMUM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung-jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	5	595.795.000	5	600.000.000	5	600.000.000	5	604.205.000	5	2.400.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	230	230	97.210.000	230	97.790.000	230	100.000.000	230	105.000.000	230	400.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	21	21	52.250.000	21	54.750.000	21	56.000.000	21	57.000.000	21	220.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dokumen	4	4	1.833.075.000	4	2.183.675.000	4	2.176.375.000	4	2.191.275.000	16	8.384.400.000	SETDA
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	2	1	779.775.000	2	779.775.000	2	779.775.000	2	780.675.000	2	3.120.000.000	SETDA BAG PERENK EU

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung-jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	0	1	31.300.000	2	93.900.000	1	62.600.000	1	62.600.000	5	250.400.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	0	1	2.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	14.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	2	1	1.020.000.000	2	1.306.000.000	2	1.330.000.000	2	1.344.000.000	2	5.000.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Dokumen	3	3	1.248.375.000	3	1.602.422.000	3	1.642.258.000	3	1.710.000.000	12	6.203.055.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	442.867.000	1	457.133.000	1	470.000.000	1	510.000.000	4	1.880.000.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	1	5.508.000	1	342.234.000	1	352.258.000	1	350.000.000	4	1.050.000.000	SETDA BAG UMUM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangk at Daerah Penang gung- jawab
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	6	6	800.000.000	6	803.055.000	6	820.000.000	6	850.000.000	24	3.273.055.000	SETDA BAG UMUM
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah	%	100	100	931.363.000	100	948.339.000	100	958.000.000	100	967.298.000	100	3.805.000.000	SETDA BAG ORGANISASI
						Persentase penyediaan analisis bidang organisasi	%	100	100		100		100		100		100	-	SETDA BAG ORGANISASI
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokum en	12	12	390.771.000	12	399.229.000	12	405.000.000	12	405.000.000	48	1.600.000.000	SETDA BAG ORGANISASI
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Lapora n	5	5	194.922.000	5	199.078.000	5	201.000.000	5	205.000.000	20	800.000.000	SETDA BAG ORGANISASI
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokum en	4	4	276.318.000	4	279.682.000	4	280.000.000	4	284.000.000	16	1.120.000.000	SETDA BAG ORGANISASI
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokum en	1	1	12.650.000	1	13.350.000	1	14.000.000	1	15.000.000	4	55.000.000	SETDA BAG ORGANISASI

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung- jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokum en	1	1	56.702.000	1	57.000.000	1	58.000.000	1	58.298.000	4	230.000.000	SETDA BAG ORGANIS ASI
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah saluran informasi publik terkait pimpinan yang dilaksanakan	Media	5	5	2.722.878.000	5	2.797.122.000	5	2.880.000.000	5	3.000.000.000	5	11.400.000.000	SETDA BAG PROKOM PIM
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Lapora n	12	12	128.700.000	12	131.300.000	12	140.000.000	12	150.000.000	48	550.000.000	SETDA BAG PROKOM PIM
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Lapora n	12	12	128.700.000	12	131.300.000	12	140.000.000	12	150.000.000	48	550.000.000	SETDA BAG PROKOM PIM
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Lapora n	12	12	2.465.478.000	12	2.534.522.000	12	2.600.000.000	12	2.700.000.000	48	10.300.000.000	SETDA BAG PROKOM PIM
Sasaran : Meningkatnya efektifitvitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					Persentase indikator kinerja tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		SETDA	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung-jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT					10.890.376.000		11.023.624.000		11.220.000.000		11.415.000.000		44.549.000.000	SETDA
						Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	1.839.800.000	100	1.844.200.000	100	1.851.000.000	100	1.855.000.000	100	7.390.000.000	SETDA
						Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	9.050.576.000	100	9.179.424.000	100	9.369.000.000	100	9.560.000.000	100	37.159.000.000	SETDA
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase peraturan bidang tata pemerintahan pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	%	100	100	1.707.072.000	100	1.708.928.000	100	1.711.000.000	100	1.713.000.000	100	6.840.000.000	SETDA BAG TAPEM
						Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100	-	SETDA BAG TAPEM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung- jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokum en	25	31	817.945.000	31	818.055.000	31	819.000.000	31	820.000.000	124	3.275.000.000	SETDA BAG TAPEM
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokum en	29	29	807.500.000	29	808.500.000	29	809.000.000	29	810.000.000	116	3.235.000.000	SETDA BAG TAPEM
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokum en	5	8	81.627.000	8	82.373.000	8	83.000.000	8	83.000.000	32	330.000.000	SETDA BAG TAPEM
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase peraturan bidang kesra pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	%	100	100	8.031.776.000	100	8.106.224.000	100	8.227.000.000	100	8.350.000.000	100	32.715.000.000	SETDA BAG KESRA
						Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra	%	100	100		100		100		100		100	-	SETDA BAG KESRA
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokum en	20	34	6.751.276.000	34	6.798.724.000	34	6.900.000.000	34	7.000.000.000	136	27.450.000.000	SETDA BAG KESRA

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangk at Daerah Penang gung-jawab
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokum en	12	12	868.000.000	12	872.000.000	12	880.000.000	12	880.000.000	48	3.500.000.000	SETDA BAG KESRA
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokum en	5	8	250.000.000	8	270.000.000	8	280.000.000	8	300.000.000	32	1.100.000.000	SETDA BAG KESRA

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangk at Daerah Penang gung- jawab
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	02	2.02	04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarg a	0	840	87.500.000	840	88.500.000	840	89.000.000	840	90.000.000	3360	355.000.000	SETDA BAG KESRA
4	01	02	2.02	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarg a	0	630	75.000.000	630	77.000.000	630	78.000.000	630	80.000.000	2520	310.000.000	SETDA BAG KESRA
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					1.018.800.000		1.073.200.000		1.142.000.000		1.210.000.000		4.444.000.000	SETDA BAG HUKUM
						Persentase verifikasi rancangan/ konsep produk hukum daerah	%	100	100	575.000.000	100	583.000.000	100	602.000.000	100	620.000.000	100	2.380.000.000	SETDA BAG HUKUM
						Persentase kasus yang terselesaikan	%	100	100	443.800.000	100	490.200.000	100	540.000.000	100	590.000.000	100	2.064.000.000	SETDA BAG HUKUM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangk at Daerah Penang gung- jawab
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokum en	1260	957	249.000.000	957	251.000.000	932	260.000.000	932	270.000.000	3778	1.030.000.000	SETDA BAG HUKUM
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	14	3	443.800.000	3	490.200.000	3	540.000.000	3	590.000.000	12	2.064.000.000	SETDA BAG HUKUM
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokum en	854	957	326.000.000	957	332.000.000	932	342.000.000	932	350.000.000	3778	1.350.000.000	SETDA BAG HUKUM
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang dilaksanakan	%	100	100	132.728.000	100	135.272.000	100	140.000.000	100	142.000.000	100	550.000.000	SETDA BAG TAPEM
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokum en	18	20	118.042.000	20	119.958.000	20	120.000.000	20	122.000.000	80	480.000.000	SETDA BAG TAPEM
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokum en	0	1	4.958.000	1	5.042.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	30.000.000	SETDA BAG TAPEM
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Lapora n	2	2	9.728.000	2	10.272.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	SETDA BAG TAPEM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangk at Daerah Penang gung-jawab
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
Sasaran : Meningkatkan efektifivitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan					Persentase indikator kinerja tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100		100		100		100		100			SETDA
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIA N DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	943.500.000	100	963.000.000	100	993.500.000	100	1.040.000.000	100	3.940.000.000	SETDA
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peraturan bidang perekonomian pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	%	100	100	362.000.000	100	372.000.000	100	381.000.000	100	390.000.000	100	1.505.000.000	SETDA BAG PEREKO NOMIAN
						Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang perekonomian	%	100	100		100		100		100		100	-	SETDA BAG PEREKO NOMIAN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung- jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokum en	41	44	45.000.000	44	47.000.000	44	48.000.000	44	50.000.000	176	190.000.000	SETDA BAG PEREKO NOMIAN
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Lapora n	100	127	177.000.000	127	180.000.000	127	183.000.000	127	185.000.000	508	725.000.000	SETDA BAG PEREKO NOMIAN
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokum en	46	62	140.000.000	62	145.000.000	62	150.000.000	62	155.000.000	248	590.000.000	SETDA BAG PEREKO NOMIAN
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	%	87.75	88	269.000.000	90	272.000.000	92	278.000.000	95	281.000.000	95	1.100.000.000	SETDA BAG ADPEMB
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokum en	1	1	65.000.000	1	66.000.000	1	69.000.000	1	70.000.000	4	270.000.000	SETDA BAG ADPEMB
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Lapora n	5	6	98.000.000	6	99.000.000	6	101.000.000	6	102.000.000	24	400.000.000	SETDA BAG ADPEMB

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangk at Daerah Penang gung-jawab
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Lapora n	46	46	106.000.000	46	107.000.000	46	108.000.000	46	109.000.000	184	430.000.000	SETDA BAG ADPEMB
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penyelesaian Pemilihan Penyedia (tender) oleh UKPBJ	%	100	100	262.500.000	100	264.000.000	100	275.500.000	100	278.000.000	100	1.080.000.000	SETDA BAG PBJ
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokum en	13	13	86.500.000	13	87.000.000	13	87.500.000	13	89.000.000	52	350.000.000	SETDA BAG PBJ
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokum en	29	29	56.000.000	29	57.000.000	29	58.000.000	29	59.000.000	116	230.000.000	SETDA BAG PBJ
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	0	100	120.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	400	500.000.000	SETDA BAG PBJ
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Penyediaan Analisis Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	%	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	59.000.000	100	91.000.000	100	255.000.000	SETDA BAG PEREKO NOMIAN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perang k at Daerah Penang gung-jawab
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokum en	2	8	30.000.000	8	33.000.000	8	35.000.000	8	40.000.000	32	138.000.000	SETDA BAG PEREKO NOMIAN
4	1	3	204	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokum en	0							2	25.000.000	2	25.000.000	SETDA BAG PEREKO NOMIAN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerj a Awal RPD (Tahu n 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangk at Daerah Penang gung- jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
									2023		2024		2025		2026				
									Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)	Targe t	Rp.(000)		Targe t	Rp.(000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokum en	0	18	20.000.000	18	22.000.000	18	24.000.000	18	26.000.000	72	92.000.000	SETDA BAG PEREKO NOMIAN
JUMLAH									45.648.278.000		46.951.638.000		47.671.273.000		48.502.883.000		188.774.072.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang menetapkan Indikator Kinerja sasaran program dan kegiatan kurun waktu 4 (empat) tahun periode yaitu tahun 2023-2026. Mengacu pada tujuan RPD adalah Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik dengan mempertahankan keberhasilan Tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah dengan target capaian 100% di tahun 2023, Nilai SAKIP dengan target 65,04 dan Nilai IKM dengan target 3,41 juga dengan sasaran Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan, dan Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda. Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang menetapkan Indikator Kinerja sasaran program dan kegiatan kurun waktu 4 (empat) tahun periode yaitu tahun 2023-2026 sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	TAHUN O (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ISU STRATEGIS : Peningkatan Peran Setda dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel							
1	TUJUAN : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik							
	Indikator Tujuan							
	Persentase Tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah	Indikator Kinerja Daerah yang memenuhi kriteria penilaian tinggi (Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494) Indikator Kinerja Daerah x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai SAKIP	Angka nilai SAKIP	65,04	65,04	65,50	65,70	66,00	66,00
	Nilai IKM	Angka nilai IKM	3,4	3,41	3,42	3,44	3,45	3,45

NO	INDIKATOR		FORMULASI INDIKATOR	TAHUN O (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
					2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.1 Sasaran : Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat							
		Indikator Sasaran							
		Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang memenuhi kriteria penilaian tinggi (Permendagri No. 86 Tahun 2017 hal. 494) $\frac{\text{Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat}}{\text{Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indikator Program							
		1. Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana}}{\text{Kebijakan Tata Pemerintahan}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR			FORMULASI INDIKATOR	TAHUN O (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
						2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2.	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana}}{\text{Kebijakan kesejahteraan rakyat}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2 Sasaran : Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan								
		Indikator Sasaran								
		Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan			$\frac{\text{Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Perekonomian dan Pembangunan yang memenuhi kriteria penilaian tinggi (Permendagri No.86 Tahun 2017 hal.494)}}{\text{Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah rumpun Perekonomian dan Pembangunan}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%
		Indikator Program								

NO	INDIKATOR			FORMULASI INDIKATOR	TAHUN O (Tahun 2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
						2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.	Persentase kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang terlaksana}}{\text{Kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3 Sasaran : Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda								
		Indikator Sasaran								
		IKM Sekretariat Daerah			Angka Nilai IKM Setda	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
		Indikator Program								
		1.	Persentase kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Kebijakan penataan organisasi yang terlaksana}}{\text{Kebijakan penataan organisasi}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2.	Persentase saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif	$\frac{\text{Saluran informasi publik terkait pimpinan aktif yang terlaksana}}{\text{Saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001

CASCADING

TUJUAN													
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik													
Persentase Tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah (%)													
Nilai SAKIP													
Nilai IKM													
SASARAN													
Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat													
Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)													
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku													
Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku													
KEGIATAN			KEGIATAN					KEGIATAN			KEGIATAN		
Administrasi Tata Pemerintahan			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			Fasilitasi Kerja Sama Daerah		
Persentase peraturan bidang tata pemerintahan pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)			Persentase peraturan bidang kesra pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)					Persentase verifikasi rancangan / konsep produk hukum daerah			Persentase Kerjasama Daerah yang dilaksanakan		
Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang tata pemerintahan			Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra					Persentase kasus yang terselesaikan					
SUB KEGIATAN			SUB KEGIATAN					SUB KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
Penataan Administrasi Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

TUJUAN
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik
Persentase Tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah (%)
Nilai SAKIP
Nilai IKM
SASARAN
Meningkatnya efektifitas kinerja urusan rumpun Perekonomian dan Pembangunan
Persentase Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah yang mencapai target rumpun Perekonomian dan Pembangunan (%)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Persentase kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Persentase peraturan bidang perekonomian pemerintah daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, SE)	Persentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	Persentase penyelesaian pemilihan penyedia (tender) oleh UKPBJ	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang SDA
Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang perekonomian			

SUB KEGIATAN			SUB KEGIATAN			SUB KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan

TUJUAN
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Baik
Persentase Tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah (%)
Nilai SAKIP
Nilai IKM

SASARAN
Meningkatnya fasilitasi dan pelayanan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal Setda
IKM SETDA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
Persentase saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif

KEGIATAN

Penataan Organisasi
Persentase peraturan bidang organisasi dan SDM aparatur yang sudah ditindaklanjuti dalam peraturan daerah
Persentase penyediaan analisis bidang organisasi

KEGIATAN

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Jumlah saluran informasi publik terkait pimpinan yang dilaksanakan

SUB KEGIATAN

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

SUB KEGIATAN

Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

EKS BAU																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar																			
KEGIATAN					KEGIATAN					KEGIATAN					KEGIATAN				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
SUB KEGIATAN					SUB KEGIATAN					SUB KEGIATAN					SUB KEGIATAN				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

EKS BAU															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar															
KEGIATAN									KEGIATAN			KEGIATAN			
Administrasi Umum Perangkat Daerah									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
SUB KEGIATAN									SUB KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Mebel	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

EKS BAU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	

KEGIATAN

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KEGIATAN

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Jumlah dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

SUB KEGIATAN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi

SUB KEGIATAN

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

SUB KEGIATAN

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan